

**PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA
KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT**

Siti Afina Kartika

NPP. 29.0701

*Asal Pendaftaran Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: afinakartika99@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) The author focuses on the problem of this research is that the death rate is increasing, but ownership of a death certificate is still low because people's knowledge of ownership of a death certificate is still low. **Purpose:** The purpose of this study is to determine public awareness in the ownership of death certificates in West Bandung Regency, to determine the factors supporting and inhibiting public awareness in West Bandung death certificate ownership, to determine the efforts made by the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency in increasing community understanding and participation in the issuance of death certificates. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative method with an inductive approach. In collecting data, the writer uses observation, interview, and documentation techniques. The theory used in this thesis is the theory of Benjamin Bloom in Notoatmodjo (2014:139) about public awareness which is divided into 3 dimensions, namely knowledge, attitudes and behavior. **Result:** Based on the results of research on public awareness in ownership of death certificates, public awareness is proven to be still low. However, the Department of Population and Civil Registration of West Bandung Regency has innovations and ways to increase ownership of death certificates. **Conclusion:** The level of public awareness is still low. This is evidenced by the graph of ownership of death certificates which is still increasing and decreasing every year. People still think that death certificates are not important documents, so many people make death certificates because they need them to disburse insurance funds or become heirs.

Keywords: Awareness, Society, Death Certificate

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) Penulis berfokus pada permasalahan angka kematian yang meningkat, namun kepemilikan akta kematian masih rendah dikarenakan pengetahuan masyarakat akan kepemilikan akta kematian yang masih rendah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian Bandung Barat, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data Penulis menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori Benyamin Bloom dalam Notoatmodjo (2014:139) tentang kesadaran masyarakat yang dibagi dengan 3 dimensi yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. **Hasil Temuan:** Berdasarkan hasil

penelitian tentang kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian, kesadaran masyarakat memang terbukti masih rendah. Akan tetapi, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bandung Barat memiliki inovasi serta cara untuk meningkatkan kepemilikan akta kematian. **Kesimpulan:** Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Hal ini dibuktikan dari grafik kepemilikan akta kematian yang masih mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Masyarakat masih menganggap akta kematian bukan dokumen yang penting, sehingga banyak masyarakat yang membuat akta kematian karena membutuhkannya untuk pencairan dana asuransi atau menjadi ahli waris.

Kata Kunci: Kesadaran, Masyarakat, Akta Kematian

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan pemerintahan diantaranya perlindungan, pengaturan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara serta penduduk guna memenuhi hak dan juga kebutuhan dasarnya dalam sebuah kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan adalah bentuk usaha yang diberikan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Bentuk pelayanannya yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia tertuang pada program-program pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan diantaranya yaitu KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain sebagainya.

Kasus kepemilikan dokumen kependudukan, tercatat di Indonesia angka wajib KTP-el di Indonesia mencapai 189.630.655 dan sebesar 96% setidaknya sudah melakukan perekaman KTP-el. Sedangkan untuk akta kelahiran dari jumlah anak 77.309.969 sebesar 81,12% telah memiliki akta kelahiran, untuk Kartu Keluarga yakni yang mempunyai Kartu Keluarga sebanyak 99,3% dari jumlah kepala keluarga 69.322.484. Dalam kasus penerbitan Akta Kematian, Kementerian dalam Negeri hanya menyebutkan perbandingan kepemilikan akta kematian dengan jumlah kematian di Indonesia yaitu 30:100 (hanya tiga puluh akta kematian yang diterbitkan setiap 100 kematian).

Ketimpangan penerbitan dokumen menjadi permasalahan yang cukup besar mengingat akta kematian tidak kalah penting dengan dokumen kependudukan lain. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan dapat digunakan untuk demokrasi, alokasi dana umum, perencanaan pembangunan, bahkan sampai pencegahan kriminalitas. Hal itu cukup untuk menjelaskan betapa pentingnya akta kematian karena dari berbagai kasus seperti bantuan dana untuk orang miskin seringkali tidak tepat sasaran dikarenakan adanya penduduk yang meninggal tetapi belum tercatat (Wibowo, 2017).

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.733.185 jiwa dengan luas wilayah 1.305,77 km² dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Lembang dengan 189.789 jiwa (<https://bandungbaratkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021). Angka kematian di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017-2021 yang cukup tinggi sebanyak 8656 jiwa. Pada tahun 2020 angka kematian di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 2750 jiwa. Namun tidak sejalan dengan jumlah pelaporan kematian di Kabupaten Bandung Barat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penerbitan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat tidak sejalan dengan pelaporan kematian. Jumlah yang membuat akta kematian di Kabupaten Bandung Barat adalah 1142 sedangkan pelaporan kematian adalah 1813, artinya 671 yang belum membuat akta kematian. Terjadinya ketimpangan antara pelaporan dengan pembuatan akta kematian ada beberapa faktor yaitu masyarakat hanya melapor, tanpa menyertakan syarat-syarat yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam membuat akta kematian. Lalu laporan angka kematian hanya dari pihak registrasi penduduk atau yang melapor hanya pihak Rt/Rw saja. Pada tahun 2020 masih banyak masyarakat yang belum mengurus akta kematian. kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat baru mencapai 41%. Sedangkan target capaian kepemilikan akta kematian yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar 70% pada tahun 2020, itu menunjukkan Kabupaten Bandung Barat masih jauh dari target nasional. Padahal tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mengurus akta kematian. Hal ini harus diteliti, apakah kesadaran masyarakat yang kurang atau peraturan perundang-undangan yang tidak efektif atau kurangnya sosialisasi. Kesadaran masyarakat ini dapat ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tingkat Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/belum sekolah	362.780
Belum tamat SD	166.074
Tamat SD	523.964
SLTP	284.987
SLTA	316.940
D1 dan D2	5.809
D3	17.916
S1	50.069
S2	4.121
S3	525
Total	1.733.185

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan terbanyak tahun 2021 tamat sekolah dasar yaitu 523.964 jiwa. Masyarakat yang belum atau tidak sekolah 362.780 jiwa. Sedangkan masyarakat yang usianya 0-4 tahun adalah 140.263 jiwa, usia 5-9 tahun adalah 165.172 jiwa, jika dijumlahkan maka usia 0-9 tahun yaitu 305.435 jiwa. Pada usia 0-7 tahun, anak-anak masih belum bisa mengikuti pendidikan sekolah dasar, artinya ada lebih dari 57.345 jiwa yang tidak sekolah. Fenomena ini sangat disayangkan sekali karna Kabupaten Bandung Barat dikenal sebagai daerah dengan pemuda yang kreatif yang bisa mengolah potensi alam daerah menjadi objek wisata yang menarik. Ini juga menjadi faktor permasalahan yang sangat mempengaruhi adanya kesadaran masyarakat karena dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan, kebijakan pemerintah serta inovasi

pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan akta kematian. Penelitian Achdiat & Yaya Mulyana berjudul Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat (2017) Adanya tumpang tindih laporan kematian, perbandingan informasi kependudukan, serta berkenaan dengan Sumber Energi Manusia di Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Penelitian Ratna Widyawati berjudul Inovasi Pelayanan Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2018) adanya Kasus kepemilikan akta kematian di Kota Surakarta. Penyebabnya warga baru mencatatkan kematian tersebut disebabkan minimnya pemahaman warga dalam mengurus akta kematian. Aspek yang pengaruhi pemahaman warga dan wujud inovasi pelayanan Pencatatan akta kematian. Teori yang digunakan menimpa inovasi pelayanan public bagi Suwarno (2008) serta Tipologi dari Mulgan & Albury (dalam Muluk, 2008). Berdasarkan hasil penelitian Rizki Anggraini tentang Administrasi Kependudukan (Studi Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 2015), penulis mengemukakan kesadaran masyarakat Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 sudah cukup tinggi meskipun ditemukan kendala di lapangan untuk merubah perilaku manusia. Penelitian ini menggunakan teori Mc. Guire untuk mencapai perubahan perilaku manusia. Penelitian Wyke Santika Dewi & Herwan Parwiyanto pada tahun 2020 berjudul Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kematian Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mengemukakan Inovasi lempeng gapit sangat mempercepat proses pembuatan akta kematian sehingga sangat memudahkan masyarakat. berdasarkan hasil penelitian A.A Made Mutia Mayani mengenai Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Tentang Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Ibu Hamil di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tahun 2021 bahwa Tingkat pemahaman ibu hamil terhadap pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Kecamatan Denpasar Barat dalam kategori cukup dan sikap ibu hamil dalam kategori sedang. Penelitian ini menggunakan teori Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo(2014) dibagi dalam 3 dimensi yaitu : kognitif,afektif, dan psikomotor

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis menganalisis terhadap kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian untuk menciptakan tertib administrasi di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu juga teori yang digunakan oleh penulis adalah teori Benyamin Bloom mengenai Kesadaran

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian Bandung Barat, untuk menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil. Peneliti dituntut untuk menganalisis secara induktif. Ciri penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen pada dasarnya berperan dalam menyediakan suatu alasan mengapa seorang peneliti melakukan penelitian kualitatif atau apa tujuan dari melakukan penelitian kualitatif tersebut. Sehingga dengan alasan atau tujuan tersebut, berhubungan dengan perhatian yang lebih kepada proses daripada produk, serta data yang akan dianalisis secara induktif dan pemaknaan sebagai suatu hal yang esensial.(Bogdan dan Biklen, 2014:26)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode yaitu menggabungkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan triangulasi sumber data untuk mengumpulkan data dari beragam informan yang berbeda. Instrumen data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, serta masyarakat sebanyak 4 orang yang terdiri dari mahasiswa, pegawai swasta, dan ibu rumah tangga

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan diuraikan sesuai tiga hal pokok yang tertera pada perumusan masalah. Hal-hal tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, faktor pendukung dan penghambat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian, serta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat.

3.1. Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat

Kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam pembuatan akta kematian. Dengan adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya akta kematian bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam kepemilikan akta kematian. Namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Bandung Barat pada 2019 masih sangat rendah dimana jumlah masyarakat yang sudah memiliki akta kematian masih rendah. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat Kabupaten Bandung Barat 1.733.186 jiwa, angka kematian pada tahun 2021 sebanyak 3.112 jiwa.

Data tersebut menjelaskan angka kematian di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2017-2021 yang cukup tinggi sebanyak 8656 jiwa. Dimana pada tahun 2021 adalah tahun dengan angka kematian yang sangat tinggi sebanyak 3112 jiwa secara keseluruhan. Kecamatan Ngamprah menjadi Kecamatan dengan jumlah kematian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu berjumlah 1304 jiwa sedangkan jumlah kematian terendah yaitu 45 jiwa terjadi di Kecamatan Sindangkerta. Dapat dilihat bahwa angka kematian selalu meningkat tiap tahunnya. Namun dengan angka kematian yang tinggi di Kabupaten Bandung Barat tidak diiringi dengan pelaporan kematian untuk pembuatan akta kematian. Kepemilikan akta kematian masih rendah dapat dilihat dari data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Bandung Barat Pada tahun 2017-2021

N O	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	LEMBANG	122	99	312	204	186	923
2	PARONGPONG	54	70	149	172	210	655
3	CISARUA	45	88	59	49	661	902

4	CIKALONGWETAN	39	34	56	81	72	282
5	CIPEUNDEUY	6	12	17	12	23	70
6	NGAMPRAH	192	162	233	155	176	918
7	CIPATAT	63	47	96	78	46	330
8	PADALARANG	190	179	213	199	164	945
9	BATUJAJAR	41	40	67	71	53	272
10	CIHAMPELAS	40	37	51	37	31	196
11	CILILIN	16	21	38	25	21	121
12	CIPONGKOR	19	19	24	23	14	99
13	RONGGA	6	11	31	7	7	62
14	SINDANGKERTA	8	8	12	13	8	49
15	GUNUNGHALU	15	10	16	15	12	68
16	SAGULING	2	4	4	1	4	15
TOTAL		858	841	1378	1142	1688	5907

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat

Tabel 3.1 menjelaskan bahwa Masyarakat yang memiliki akta kematian dari tahun 2017-2021 berjumlah 5907 jiwa. Sedangkan jumlah kematian dari tahun 2017-2021 sebanyak 8656 jiwa. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mengurus akta kematian. Pada tahun 2020 Kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat mencapai 41%. Sedangkan target capaian kepemilikan akta kematian yang diberikan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar 70% pada tahun 2020, artinya Kabupaten Bandung Barat masih jauh dari target nasional.

Kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat akan dianalisis dari perspektif teoritis, peneliti menggunakan teori dari Benyamin Bloom dalam Notoatmodjo (2014:139) yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yakni pengetahuan, sikap, dan tindakan.

3.1.1 Pengetahuan

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami pentingnya akta kematian. Hal ini ditegaskan oleh Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam wawancara peneliti pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 13.30 WIB di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bandung Barat masih rendah pengetahuannya terkait akta kematian, apalagi masyarakat yang berada di desa. Mereka menganggap akta kematian hanya dibuat untuk syarat pembagian warisan, asuransi atau untuk keluarganya yang pegawai. Padahal kan itu juga sebagai dokumen yang penting yang harus dimiliki masyarakat setelah ada keluarga yang telah meninggal dunia

Hal ini dapat dibuktikan dari masyarakat yang belum memiliki akta kematian, yang dapat dilihat dari tabel 3.2:

Tabel 3.2
Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Yang Belum Memiliki Akta Kematian Pada tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	LEMBANG	0	3	4	3	0	11
2	PARONGPONG	0	1	0	0	0	1
3	CISARUA	12	94	90	125	88	296
4	CIKALONGWETAN	0	76	7	14	25	122
5	CIPEUNDEUY	0	31	81	94	183	389
6	NGAMPRAH	62	241	114	145	131	693
7	CIPATAT	13	60	83	115	35	306
8	PADALARANG	0	192	104	150	204	650
9	BATUJAJAR	8	9	139	274	160	590
10	CIHAMPELAS	73	326	221	110	34	764
11	CILILIN	8	8	35	155	157	363
12	CIPONGKOR	13	115	132	171	157	588
13	RONGGA	11	20	75	134	121	361
14	SINDANGKERTA	1	3	0	0	0	4
15	GUNUNGHALU	23	216	104	75	61	479
16	SAGULING	8	8	5	43	68	132
	TOTAL	232	1.403	1.194	1.477	1.424	5.730

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat 2022

Pada Tabel 3.2 dijelaskan kepemilikan akta kematian yang selalu terjadi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

3.1.2 Sikap

Sikap masyarakat untuk berpartisipasi sangat dipengaruhi beberapa hal. Sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki mutu hidupnya adalah hal pertama. Selain itu adalah kesediaan masyarakat untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pelaksanaan pembuatan akta kematian, keterlibatan dalam kebersamaan untuk memecahkan masalah, serta kemandirian dan kepercayaan diri dalam proses pengambilan keputusan pembuatan. Masyarakat yang sudah memiliki kesadaran atau memiliki sikap dari dalam dirinya untuk berpartisipasi akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab akan pentingnya pembuatan akta kematian. Berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan sikap untuk berpartisipasi yang cenderung tidak merasakan bagaimana pentingnya akta kematian. Dengan adanya sikap yang timbul dalam diri, masyarakat dapat lebih peduli pentingnya akta kematian.

Dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat inovasi diantaranya dengan adanya layanan online yaitu Sistem Daftar Layanan Online (SIDILAN) dan Jemput Bola Kendaraan Keliling (Jebol Darling) inovasi yang dibuat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bandung barat diterima baik oleh masyarakat karena tidak ada penentangan atau protes dari pihak manapun. Karena inovasi tersebut sangat baik dan memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kematian.

3.1.3 Tindakan

Persepsi masyarakat diatas bahwa masyarakat memang merasa akta kematian itu tidak begitu penting dibandingkan dokumen yang lain. Selain itu juga masyarakat masih menanamkan bahwa pembuatan dokumen kependudukan itu ribet karena harus dari satu meja ke meja yang lain. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan grafik yang belum membuat akta kematian

Grafik 3.1
Persentase Kepemilikan Akta Kematian
Pada Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat 2021

Pada grafik 3.1 dijelaskan tahun 2017 yang memiliki akta kematian hanya 21%, Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 62% namun pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali

menjadi 46% lalu pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 53% dan pada tahun 2022 terjadi penurunan akta kematian menjadi 45%.

Pelayanan serta informasi yang diberikan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sangat jelas. Namun dari perhitungan tingkat kesadaran masyarakat Bandung Barat, memang masih sangat rendah karena dari beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada masyarakat. Pengetahuan masyarakat terhadap pembuatan akta kematian memang masih rendah dan merasa tidak penting karena belum membutuhkannya

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat

Kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian dapat didukung dengan beberapa faktor. Faktor-faktor pendukung tersebut tidak lain adalah dukungan dari pemerintah, koordinasi yang baik antar instansi, semangat petugas dalam memberikan pelayanan pembuatan akta kematian, serta peran perangkat kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor yang menghambat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu keadaan geografis yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, pemerintahan desa

3.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat

Sebagai upaya mengatasi faktor-faktor eksternal, selanjutnya perlu diperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan. Peranan seluruh stakeholders yang terlibat dalam berjalannya pelayanan akta kematian tersebut sangat penting. Dalam hal ini, stakeholders yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi lainnya yang saling berkaitan. Secara rinci, di bawah ini akan dibahas upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian. Upaya yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat saat menjalankan program jemput bola kendaraan keliling, perbaikan dan penambahan jumlah sarana prasarana, memanfaatkan media komunikasi, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, bekerjasama dengan petugas rumah sakit.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kesadaran masyarakat ini sangat penting untuk dibahas karena dalam pembuatan akta kematian sendiri, harus adanya kemauan dan keinginan masyarakat untuk membuat. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat membuat inovasi inovasi yang menggerakkan minat masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya kepemilikan akta kematian. Bukan hanya untuk masyarakat tertentu yang membutuhkannya saja. Inovasi yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yaitu pelaksanaan program jemput bola yang dimana pelayanan langsung dilakukan di desa dan dokumen kependudukan bisa langsung jadi di tempat pada hari itu juga. Lalu ada program berbasis online melalui web yaitu Sistem Daftar Layanan Online (SIDILAN), dimana masyarakat membuat dokumen kependudukan dari rumah dan langsung dikirim ke rumah

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung Barat masih sangat rendah. Masyarakat masih menganggap akta kematian bukan dokumen yang penting, sehingga banyak masyarakat yang membuat akta kematian karena membutuhkannya untuk pencairan dana asuransi atau menjadi ahli waris. Terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung Barat yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang cukup rendah. Sehingga jika ada sosialisasi secara langsung atau online, masyarakat menganggap hal tersebut tidak jelas dan menghabiskan waktu saja. Keadaan geografis kabupaten bandung barat yang luas. Sehingga banyak daerah yang sangat jauh untuk ke kantor, namun jika membuat di rumah, masyarakat tidak mengerti cara menggunakan web Sidilan.

Upaya upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung Barat sudah bagus. Karena tidak menunggu masyarakat yang membuat akta kematian namun dari petugasnya sendiri yang sudah membuat akta kematian tanpa diminta. Untuk upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pelaksanaan sosialisasi baik langsung maupun melalui online seperti penggunaan zoom untuk webinar, video video di media sosial

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Namun dengan waktu yang terbatas penulis masih dapat berkomunikasi dengan pihak terkait melalui *whatsapp*.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyak kekurangan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Harapan kedepannya dilakukan penelitian yang lebih mendalami dokumen kependudukan lainnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Allah S.W.T, Orang tua penulis, Dosen Pembimbing I yaitu ibu Dra. Gatingsih, M.T, Dosen Pembimbing II yaitu Dr. Rully Sumual, S.Pd, M.AP. Serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fakrulloh, Zudan dan Wismulyani, Endang. 2019. *Tertib Administrasi Kependudukan*. Macanan Baru: Cempaka Putih.
- Hamdi, Muchlis dan Siti Ismaryati. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Humaniora.
- Hutasoit, Imelda. 2016. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. IPDN.
- Mantra, Ida Bagoes 2020. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2014. *Ilmu Perilaku Kesehatan* Jakarta: Rineka Cipta.
- Poedjawijatna. 2004. *Tahu dan Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simorangkir, O. P. 1987. *Kesadaran, Pikiran dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Yagrat.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemartomo, Triyuni dan Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Profesi Mandiri
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edy. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Usman, Rachmadi. 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar grafika

Widjaja, A.W. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Palembang: CV. Era Swasta.

